

SKRIPSI

KAJIAN KONFLIK NELAYAN PANCING ULUR DENGAN NELAYAN TRAWL DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI PERIKANAN, DI PULAU SANANE, KABUPATEN PANGKEP

**(Studi Kasus Di Pulau Sanane, Kecamatan Liukang
Tuppabiring, Kabupaten Pangkep)**

Disusun dan diajukan oleh:

AYUB KHAN

L241 16 008



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

KAJIAN KONFLIK NELAYAN PANCING ULUR DENGAN NELAYAN TRAWL DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI PERIKANAN, DI PULAU SANANE, KABUPATEN PANGKEP

**(Studi Kasus Di Pulau Sanane, Kecamatan Liukang
Tuppabiring, Kabupaten Pangkep)**

Disusun dan diajukan oleh:

AYUB KHAN

L241 16 008



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN KONFLIK NELAYAN PANCING ULUR DENGAN NELAYAN TRAWL DALAM
PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI PERIKANAN, DI PULAU SANANE, KABUPATEN
PANGKEP

Disusun dan diajukan oleh:

AYUB KHAN

L241 16 008

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 11
Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si

NIP. 19640617 199103 2002

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si

NIP. 197104121999021 003

Ketua Program Studi

Sosial Ekonomi Perikanan



Dr. Hamzah, S.Pi, M.Si

NIP. 197101262 200112 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayub Khan

NIM : L241 16 008

Program Studi : Sosial Ekonomi Perikanan

Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul "**KAJIAN KONFLIK NELAYAN PANCING ULUR DENGAN NELAYAN TRAWL DALAM PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DI PULAU SANANE KABUPATEN PANGKEP**" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, Tahun 2007).

Makassar, 19-02-2021



Ayub Khan
Ayub Khan
NIM L24116 008

PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

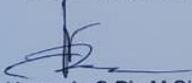
Nama : Ayub Khan
NIM : L241 16 008
Program Stud : Sosial Ekonomi Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

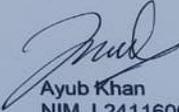
Makassar, 19 - 02 - 2021

Mengetahui,

Ketua Prodi
Sosial Ekonomi Perikanan (SEP)


Dr. Hamzah, S.Pi., M.Si.
NIP. 19710126 200112 1 001

Penulis


Ayub Khan
NIM. L24116008

AYUB KHAN : L24116008 “Kajian Konflik Nelayan Pancing Ulur Dengan Nelayan Trawl Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Perikanan, Di Pulau Sanane, Kabupaten Pangkep” dibimbing oleh **Sutina Made** sebagai pembimbing utama dan **Andi Adri Arief** sebagai pembimbing Anggota.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk terjadinya konflik antara nelayan ulur dengan nelayan trawl, dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan nelayan Pulau Sanane, serta resolusi konflik antara nelayan ulur dengan nelayan trawl. Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Sanane, Kabupaten Pangkep, pada bulan agustus 2020 sampai september 2020. Metode pengambilan sampel adalah *cluster sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan, analisis data deskriptif kualitatif, dan *focus group discussion* (FGD). Konflik yang terjadi di Pulau Sanane Kabupaten Pangkep adalah konflik kelas antara nelayan tradisional dengan nelayan pendatang (trawl) yang berasal dari pulau Podang-Podang Kabupaten Pangkep. Pada nelayan pancing Pulau Sanane didapatkan rata-rata pendapatan sebelum adanya penggunaan trawl sebesar Rp. 3,282,683/bulan akan tetapi mengalami penurunan drastis akibat adanya penggunaan trawl, dengan beroperasinya kapal-kapal trawl disekitaran Pulau Sanane dengan rata-rata jumlah penurunan pendapatan perbulan sebesar Rp. 668,933-. Resolusi konflik yang di hasilkan dari proses mediasi antar kedua pihak nelayan yang di pandu oleh kapolsek Liukang Tuppabiring mengasilkan solusi yaitu pembuatan batas penangkapan sekitar wilayah Pulau Sanane yang wajib dihindari nelayan trawl.

Kata kunci: Konflik, Pendapatan, Resolusi Konflik

AYUB KHAN: L24116008 "Study of Conflict of Trawling Fishermen and Fishermen in Fisheries Socio-Economic Perspective, on Sanane Island, Pangkep Regency" supervised by **Sutina Made** as the main mentor and **Andi Adri Arief** as a member mentor.

Abstact

This research aims to determine the form of conflict between hand-held fishermen and trawl fishermen, and to determine the effect on the income of fishermen in Sanane Island, as well as conflict resolution between hand-held fishermen and trawl fishermen. This research was conducted on Sanane Island, Pangkep Regency, from August 2020 to September 2020. The sampling method was cluster sampling with a sample size of 20 people. The data sources used are primary data and secondary data. Data were analyzed using income analysis, qualitative descriptive data analysis, and focus group discussion (FGD). The conflict that occurred in Sanane Island, Pangkep Regency, was a class conflict between traditional fishermen and trawlers from Podang-Podang Island, Pangkep Regency. In Sanane Island fishing rod fishermen, an average income before the use of the trawl is Rp. 3,282,683 / month but experienced a drastic decline due to the use of trawlers, with the operation of trawlers around Sanane Island with an average monthly decrease in income of Rp. 668,933-. The conflict resolution resulted from the mediation process between the two fishermen guided by the Liukang Tuppabiring police chief resulted in a solution, namely the creation of fishing boundaries around the Sanane Island area which trawl fishermen must avoid.

Key words : Conflict, income, Conflict Resolution

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai **Kajian konflik nelayan pancing ulur dengan nelayan trawl dalam perspektif sosial ekonomi perikanan di Pulau Sanane kabupaten pangkep**, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan khusus kepada penyemangat, pembimbing dan penyempurna segala perilaku semasa hidupku, kedua orang tua tercinta Ayahanda **Khanna Sadjo**. dan Ibunda **Mardiana** terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sabar dalam menghadapi semua keluh kesah penulis, serta telah memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis terima kasih karena telah menjadi canda dan tawa, serta penguat bagi penulis, penulis tidak mampu melangkah sejauh ini tanpa bimbingan kedua orangtua tercinta. Untuk kakaku dan adikku beserta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat selama ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada keluarga kita. Amiin.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya hantarkan kepada Ibu **Prof. Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si** selaku penasehat akademik, pembimbing ketua dan juga telah menjadi pengganti orang tua dalam memberikan nasihat, arahan, dukungan, dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Juga kepada pembimbing anggota Bapak **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si**

yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. St. Ir. Aisyah Fahrum, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Ir. Gunarto Latama, M.Sc** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Hamzah, S.Pi., M.Si** selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Pi, MS.i, M.Si. dan Ibu Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, MS.i** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun.
5. **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
6. **Seluruh Staf Administrasi FIKP** yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. **Indriyasari dan Asrul Ramli** yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu proses pengambilan data pada penelitian ini, terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama ini.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini **Asmawati Hajar, Hajriani Salpidata, Ridwan Daini, Rika Rahayu, Rismawati, Devi Aprilia, St. Marlian M, S.Pi., Hasri Liyani, Afarni Mulia Ningsih, Bagas, Fitriani, Haslinda Melani, Nurlatifah Amu, S.Pi., Nuramalia Hasman, Nurul Ainun, Azisah Azzahra, Muh. Ihsan, Rosnani Samad, Trikartika Subair, Muh. Ilham, Agussalim AlFath, Iis Inayah Ismail, Kadek Mudiwana, Disty Dwi Wahyuningsih & Rezki Inta** yang telah memberikan bantuan, semangat, dan pengalaman yang sangat berharga selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Sahabat-sahabat **Sosial Ekonomi Perikanan 2016 (F16URE)** lainnya (**Fitriana, Tami Azzahra Nur, Regita Saskia Sari, Andi Nurul Khasanah, Suriyanti, Nur Basyasya, Dias Reza, Darmawansyah, Syuhardiman, Fedri Dwiyanto, Febriza, Mega Aulia, Reski Amalia, Rifkah Zhafirah, Yuswandi Yusuf, Asmiana, Waode**

Siti Adawiah, Riski Ayu, Alfani Amirullah, A Nur Indah, Nur Afni Rustan, & Nur Fiqhi Islamiyah)

4. **Kosan Cangko (Anca, indrawan, Ucu, Cancu, Yoga, Iank, Emank, Aas dan Ari Baraccung)** yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama ini.
5. **Badan Pengurus Harian Fisheries Diving Club Universitas Hasanuddin (FDC-NHAS) FIKP UNHAS Periode 2019/2020 (Tahul, Mardia, Oya, Ansar, Dodi, Edgar dan FiqiUh,)** dan **Dewan Selam FDC unhas** serta seluruh kawan-kawan organisatoris yang telah memberikan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan.
6. **Kakanda Arya Anugrah, Akhirullah, Aldair Mukhstofa, Ashari Madjid, Mustakim & Asri Triyadi** serta **adinda Nining, Kakanda Riri, Kakanda Safarni, Nining, Diana, Rasul & Asrul** terimakasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama menempuh pendidikan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2021

Ayub Khan

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Parepare pada Tanggal 09 Maret 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Khanna Sadjo dan Ibu Mardiana. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2004 pada SD Negeri 1 Madello Kab.Barru dan lulus pada tahun 2010 pada saat menempuh pendidikan di SD sering mewakili sekolah ke berbagai olimpiade dan perlombaan akademik lainnya, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Balusu pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2013, pada saat SMP Aktif mengikuti kegiatan Pramuka. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Barru pada tahun 2013, pada saat SMA aktif mengikuti berbagai organisasi kesiswaan yaitu sebagai Koordinator Bidang Organisasi, Pramuka dan Kepemimpinan OSIS SMA Negeri 1 Barru Kemudian lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan pada Universitas Hasanuddin Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan melalui jalur SNMPTN .

Sebagai seorang mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, salah satunya pernah menjabat sebagai Kordinator Peralatan badan pengurus Harian FDC unhas Periode 2019/2020, Anggota Divisi Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan Periode 2018/2019, Badan Pengurus Wilayah Anggota Divisi Advokat Himpunan Mahasiswa Pengusaha Indonesia 2019/2020. Selain itu dalam bidang akademik penulis juga aktif sebagai asisten di berbagai mata kuliah yaitu Praktek lapang Ekologi Perairan tahun 2018-2019

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 102 tematik PPM Barru Kabupaten Barru Kecamatan Barru Kelurahan Tuwung. Melaksanakan Praktik Kerja Lapang di PT. Esaputlii Prakarsa Utama, serta melakukan penelitian di Pulau Sanane Kabupaten Pangkep dengan mengangkat judul kajian konflik nelayan pancing ulur dengan nelayan trawl dalam perspektif sosial ekonomi perikanan di Pulau Sanane kabupaten pangkep.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| HALAMAN SAMPUL | <i>i</i> |
| NIP. 19710126 200112 1 001 | <i>Error! Bookmark not defined.</i> |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | <i>Error! Bookmark not defined.</i> |
| PERNYATAAN AUTHORSHIP | <i>iv</i> |
| KATA PENGANTAR | <i>viii</i> |
| RIWAYAT HIDUP | <i>xi</i> |
| DAFTAR ISI | <i>xii</i> |
| I. PENDAHULUAN | <i>1</i> |
| A. Latar Belakang | <i>1</i> |
| B. Rumusan Masalah..... | <i>3</i> |
| C. Tujuan Penelitian | <i>3</i> |
| D. Kegunaan Penelitian | <i>3</i> |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | <i>4</i> |
| III. METODE PENELITIAN | <i>26</i> |
| A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian | <i>26</i> |
| B. Jenis Penelitian | <i>26</i> |
| C. Sumber Data | <i>27</i> |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | <i>27</i> |
| E. Teknik Analisis Data | <i>28</i> |
| B. Saran | <i>58</i> |
| DAFTAR PUSTAKA | <i>59</i> |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering di temukan di berbagai wilayah perairan. Menurut Satria (2000) gejala konflik antar nelayan sering terjadi di sebabkan perebutan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Perebutan ini muncul karena karakteristik sumberdaya perikanan yang bersifat *open access*, seolah-olah sumberdaya dapat dikuasai sembarang orang, di sembarang waktu dan dengan sembarang alat tangkap. Selain itu, permasalahan yang dihadapi nelayan bukan satu-satunya dilihat dari tingginya tingkat ketergantungan akan sumberdaya perikanan, melainkan secara nyata nelayan juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi praktik-praktik yang berlaku *diareal fishing ground* mereka seperti penggunaan alat tangkap yang lebih canggih/modern.

Konflik mengenai alat tangkap yang dihadapi oleh nelayan tradisional dan nelayan modern sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat di mana konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Bagi nelayan tradisional, menjaga ekosistem laut dengan cara mengembangkan budaya kerarifan lokal sangat penting demi keberlangsungan hidup untuk jangka waktu yang lama.

Menurut Kusnadi (2003) bahwa masuknya modal dan teknologi yang lebih canggih telah mempercepat proses penipisan dan kelangkaan sumberdaya perikanan yang ada. Di samping itu, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial juga meningkat di dibandingkan dengan masa sebelum dioperasikannya alat tangkap yang lebih modern. Sejalan dengan itu, perbedaan kapasitas teknologi serta modal, dan akses antarpengguna sumber daya perikanan berpotensi menimbulkan konflik pengelola sumber daya.

Alat penangkapan ikan jaring Trawl merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Dasar hukum pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring Trawl yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Serta Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Latar belakang konflik sosial ini terjadi karena kecemburuan sosial yang di picu oleh kenyataan bahwa salah satu pihak dapat memperoleh bagian yang terbesar dari eksploitasi sumber daya perikanan, sedangkan pihak yang lain sebaliknya. Konflik sosial yang muncul adalah manifestasi dari kesenjangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan di antara kelompok-kelompok masyarakat nelayan (Kusnadi, 2003).

Dalam kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional Pulau Sanane bentuk kesulitan nelayan dapat di lihat dari kapasitas Alat tangkap yang masih sederhana, biaya operasional melaut , penghasilan yang tidak dapat di prediksi secara pasti serta terganggunya aktifitas penangkapan nelayan dikarenakan maraknya operasi penangkapan berupa alat tangkap jaring *trawl* telah berujung pada konflik kelas nelayan. Konflik kelas yang terjadi pada kehidupan nelayan tradisional Pulau Sanane dan nelayan *Trawl*, konflik yang terjadi di sebabkan adanya rasa ketidakpuasan nelayan tradisional terhadap nelayan modern (*trawl*) yang memasuki areal tangkapan rutinitas mereka serta menjadi alasan jika berkurangnya Tangkapan Mereka di akibatkan pengoperasian alat Tangkap yang Tidak ramah lingkungan (*trawl*).

Bagi nelayan tradisional Pulau Sanane, pengoperasian alat tangkap *trawl* di wilayah rutinitas tangkapan mereka telah mengakibatkan berkurangnya penghasilan dari melaut, dimana dalam operasi penangkapan nelayan tradisional Pulau Sanane hanya menggunakan peralatan tangkap yang relatif sederhana, yakni dengan kendaraan laut berupa Perahu Jolloro dan peralatan tangkap berupa Pancing Ulur (*Hand Line*), serta jarak tempuh atau kapasitas tangkapan yang terbatas, yang juga secara nyata akan berpengaruh pada perolehan penghasilan mereka.

Kondisi demikian begitu berbeda dengan nelayan *Trawl* yang menggunakan peralatan tangkap lebih produktif dengan kapasitas tangkapan yang lebih banyak. Keadaan seperti ini, tentunya telah memancing kecemburuan sosial nelayan tradisional yang merasa kalah bersaing dan merasa sangat di rugikan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan diareal tangkap rutinitas mereka sendiri, sehingga bentuk kekecewaan ini selalu berujung pada konflik antar kelas nelayan.

Masih beroperasinya kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap *trawl* diperaian Pulau Sanane juga tidak lepas dari lemahnya pengawasan penegak hukum dalam memperhatikan pengopersian alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan , sekalipun demikian penegakan hukum terhadap pelanggaran aktifitas *Trawl* tidak mudah dilakukan, para nelayan tetap mengoperasikan dengan cara sembunyi sembunyi dan di operasikan pada malam hari. Sehingga pelanggaran yang terjadi beberapa kali oleh nelayan *trawl*, membuat para nelayan tradisional menjadi kesal dan bertindak anarkis dan berakhirlah dengan aksi cekcok dari kedua kelas nelayan ini.

Berdasarkan aspek permasalahan yang di hadapi nelayan tradisional jika ditelusuri jelas perbedaan kelas alat tangkap diareal *fishing ground* berpengaruh pada kesenjangan sosial ekonomi antar pengguna sumber daya perikanan. Dengan menurunnya konsistensi pendapatan dari melaut, tentu menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup para nelayan yang ada di Pulau Sanane. Sehingga dengan permasalahan tersebut maka saya mengambil judul penelitian “ ***Kajian Konflik Nelayan Pancing Ulur dengan Nelayan Trawl dalam perspektif sosial ekonomi Perikanan, di Pulau Sanane, Kabupaten Pangkep***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara nelayan pancing ulur dengan nelayan Trawl ?
2. Bagaimana pengaruh perubahan pendapatan nelayan pancing ulur di Pulau Sanane sejak beroperasinya alat tangkap Trawl?
3. Bagaimana resolusi penyelesaian konflik nelayan yang terjadi di Pulau Sanane

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk terjadinya konflik antara nelayan ulur dengan nelayan Trawl
2. Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan nelayan Pulau Sanane
3. Untuk mengetahui resolusi konflik antara nelayan ulur dengan nelayan Trawl

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin
2. Menjadi sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama studinya di Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin
3. Memberikan masukan atau sebagai referensi bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan masyarakat setempat dalam mengelola dan menangani konflik karena permasalahan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Imron (2003) dalam Fargomeli (2014) mengungkapkan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Kusnadi (2009) dalam Fargomeli (2014) mengatakan bahwa secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. (Imron, 2003) Seperti masyarakat lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional kusnadi (kusnadi 2009). Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka (Fargomeli, 2014).

Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras, yang selalu diliputi ketidakpastian dalam usahanya. Masalah utama yang dihadapi nelayan adalah kemiskinan yang perlu mendapat perhatian lebih khusus dan terfokus. Kemiskinan yang mereka alami merupakan suatu realita atau fakta yang tak terbantahkan. Fenomena kehidupan sosial masyarakat miskin disekitar pesisir, khususnya kehidupan nelayan

tradisional, sering teridentifikasi sebagai kehidupan kelompok masyarakat khusus yang selama ini kental dengan karakteristik memiskinkannya: tinggal di perkampungan kumuh, memiliki aspirasi dan akses yang rendah terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, dan kesehatan serta bantuan sosial lainnya. kondisi kehidupan sosial seperti itu dapat disebut sebagai ketidakterjaminan sosial struktural (*structural insecurity*) yang antara lain disebabkan oleh tingkat ekonomi yang tidak memadai (Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial & Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 2005). Kemiskinan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dihubungkan dengan faktor ekonomi di mana ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dalam arti rendahnya penghasilan atau mata pencaharian yang diterima dalam bekerja (Suryaningsi, 2017).

Urgensi modernisasi perikanan melalui perbaikan teknologi atau alat tangkap untuk peningkatan produksi dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kita masih *undercapacity* untuk memanfaatkan potensi perikanan budidaya maupun tangkap. Pada umumnya, modernisasi perikanan melalui peningkatan kualitas alat tangkap didorong untuk meningkatkan produksi perikanan. Berbagai pengalaman menunjukkan hal itu secara umum, ada beberapa pengaruh positif dari kelangsungan modernisasi perikanan tersebut, antara lain Satria (2002): (1) terjadi peningkatan produksi perikanan; (2) peningkatan pendapatan nelayan; (3) Mendorong tersedianya lapangan kerja baru.

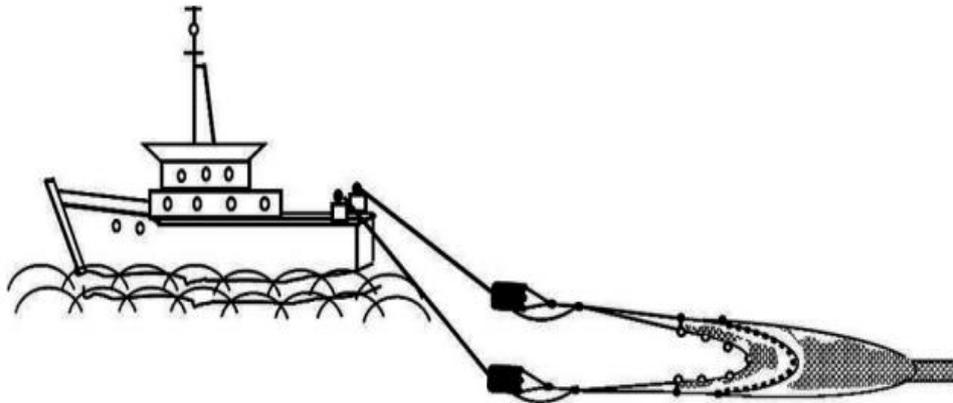
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi perikanan sering kali menyebabkan juga berbagai macam permasalahan berupa ketimpangan antarnelayan dan tidak jarang menyebabkan konflik. Menurut Kusnadi (2003) kebijakan modernisasi perikanan hanya berfokus pada upaya peningkatan produktifitas dalam kerangka besar ekonomi nasional. Padahal, upaya pelestarian dan menjaga kelangsungan sumber daya perikanan sangat diperlukan agar sumber daya tersebut dapat dieksploitasi secara berkelanjutan. Akibatnya timbul beberapa hal yang menjadi timbal balik dalam kegiatan pembangunan perikanan nasional.

1. Timbul konflik sosial antar nelayan yang menggunakan peralatan canggih.
2. Mekanisme perahu dan modernisasi peralatan tangkap telah meningkatkan akselerasi kerusakan dan kelangkaan sumber daya perikanan.
3. Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di kalangan nelayan. Modernisasi hanya mampu meningkatkan pendapatan nelayan dalam jangka pendek.

Dengan adanya kerusakan lingkungan maka kelangkaan sumber daya

perikanan dengan eksploitasi secara berlebihan telah menyebabkan nelayan sulit memperoleh hasil tangkapan, hanya nelayan bermodal besar dan memiliki akses ekonomi yang luas bisa bertahan dan memanfaatkan peluang modernisasi perikanan.

B. Trawl dan Polemik Aturannya



Gambar 1.pengoperasian Trawl

Pengoperasian trawl dimulai dengan mempersiapkan jaring dan beberapa alat bantu. Pemasangan tali-temali, seperti ikatan tali kantong jaring, pemasangan kedua ujung sayap jaring pada tali penghubung antara jaring dan *outher board*; *outher board* dengan *winch* di kapal terpasang sempurna. Sebelum jaring diturunkan terlebih dahulu ditaksir kedalaman perairan, ini mutlak diperlukan karena untuk menentukan seberapa panjang tali penarik yang diperlukan. Tak kalah penting adalah mengetahui type dasar perairan, memungkinkan atau tidak untuk dilakukan trawling.

Untuk itu sebelum jaring diturunkan dilakukan penyisiran terlebih dahulu dengan echo sounder untuk mengetahui type dasar perairan. Operasional Trawl baru bisa dilakukan setelah diketahui bahwa perairan tersebut dan benarbenar aman untuk dilakukan trawling. Dengan kecepatan kapal 4-5 knot jaring diturunkan terlebih dahulu adalah bagian kantong, kemudian seluruh badan jaring dan sayap jaring hingga tali penghubung jaring dan *outher board*. Setelah bukaan jaring kelihatan sempurna di atas permukaan air, kemudian *outher board* diturunkan di bawah permukaan air. Setelah ke 2 *outher board* kelihatan sempurna, tali penarik (*wrap*) di ulur sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kedalaman.

Kecepatan putaran winch tidak lebih dari kecepatan kapal untuk menjaga *outher board* tetap berdiri. Kemudian dilakukan penarikan (*towing*) selama kira-kira 60 menit dengan kecepatan rata-rata 3 knot. Selain ukuran panjang tali penarik faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan operasional trawl adalah Kecepatan kapal. Kalau

kapal terlalu cepat, trawl bisa melayang. Sedangkan kalau kapal terlalu pelan, trawl bisa membenam kelumpur dan akhirnya akan mengurangi bukaan jaring.

Selain faktor kecepatan kapal dan panjang tali penarik berat jaring itu sendiri di dalam air juga sangat menentukan keberhasilan operasional trawl. Dengan berat jaring tertentu bila ditarik dengan kecepatan kapal lebih tinggi dan tali penarik kurang panjang jaring akan melayang, bila ditarik dengan kecepatan kapal rendah dan tali penarik terlalu panjang maka jaring akan terlalu mendasar. Kegiatan trawling dilakukan di perairan yang relatif datar dengan kedalaman 10 m sampai 40 m.

Dari sekian banyak jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Indonesia, mungkin alat tangkap cantrang yang paling fenomenal dewasa ini. Betapa tidak, selama dua tahun terakhir nelayan cantrang terus menyampaikan penolakannya terhadap Permen-KP 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan kategori pukat tarik (*seine nets*) yang menggunakan mata jaring (*mesh size*) relatif kecil, yaitu 1,5 inci. Dengan ukuran tersebut, cantrang tidak selektif terhadap ikan target dan menangkap ikan segala ukuran, termasuk ikan ukuran kecil. Ikan-ikan non-target yang tertangkap cantrang (*by-catch*) biasanya dibuang, sementara ikan target berukuran kecil dijual dengan harga murah. Tertangkapnya ikan kecil, terutama juvenil ikan, menyebabkan populasi ikan tidak dapat berkembang biak. Hal inilah yang menyebabkan cantrang dianggap sebagai alat tangkap tidak ramah lingkungan yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Alat tangkap cantrang ini terdiri dari tali ris atas (*head rope*) 36,0 meter, tali ris bawah (*ground rope*) 40,0 meter, badan jaring terbuat dari PE, diameter mata 1,5- 4,0 inci, kantong jaring panjangnya 6 meter dengan diameter mata 1,5 inci, otter board berbahan utama besi dan papan kayu berukuran panjang 250 cm, lebar 130 cm, tebal 5 cm, dengan berat 300 kg.

Jenis alat tangkap seperti ini sebenarnya telah dilarang sejak tahun 1980 yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*. Menteri Pertanian saat itu menjelaskan bahwa nama lain jaring *trawl* adalah pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan lain-lain, Namun dalam perkembangannya pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya dimana pada tahun 2008 jaring *trawl* diizinkan penggunaannya secara lokal melalui Permen-KP 6/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Pada tahun 2011, pemberlakuan jaring *trawl* kembali dilegalkan secara nasional melalui Permen-KP 2/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Permen ini menyebutkan bahwa cantrang merupakan salah satu jenis pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) yang menggunakan kapal motor berukuran lebih kecil dari 30 GT.

Seiring dengan diangkatnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, cantrang dilarang digunakan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dengan berlakunya Permen-KP 2/2015, maka Permen-KP 2/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya, pemerintah dan pemerintah daerah tidak akan memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang, baik izin baru maupun izin perpanjangan. Penggunaan cantrang akan dianggap sebagai tindakan illegal sehingga aparat penegak hukum di laut, polisi dan pengawas perikanan, dapat mengambil tindakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan cantrang (Megawanto,2017).

Menurut (Sudirman,2008) dalam penelitiannya yang berjudul Deskripsi alat tangkap cantrang, analisis bycatch, discard dan komposisi ukuran ikan yang tertangkap di perairan takalar menyatakan bahwa perbedaan cantrang dengan alat tangkap trawl adalah trawl menggunakan bean sebagai pembuka mulut jaring sedangkan Pada cantrang, untuk membuka mulut jaring digunakan pelampung dengan yang fungsinya sama namun demikian jika dilihat dari prinsip penangkapan hanya sedikit perbedaannya. Kalau trawl jaring ditarik 1-3 jam lalu dilakukan hauling namun pada cantrang penarikan jaring hanya untuk mempertemukan kedua sayapnya,lalu dilakukan penarikan jaring Dengan demikian waktu yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan lebih singkat, berdasarkan penelitian ini cantrang tidak ramah lingkungan terhadap beberapa species tangkapan dari sudut ukuran dan tingkat kematangan gonad (TKG) seperti ikan biji nangka (*Upenus moluccensis*).

Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum, maka penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik dari aspek keadilan, tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat nelayan di Sibolga karena penerapan peraturan menteri tersebut hanya memihak kepada nelayan kecil bukan untuk nelayan besar karena peraturan menteri tersebut tidak memberikan solusi kepada keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

Penerapan peraturan menteri ini apabila juga dikaji dari aspek kemanfaatan maka peraturan menteri tersebut memberikan kemanfaatan ekologis, kemanfaatan ekonomi maupun kemanfaatan sosial dan budaya. Kemanfaatan dari aspek ekologis

memberikan manfaat bagi lingkungan laut dalam mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries). Kemanfaatan secara ekonomis dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri tersebut meningkatkan pendapatan bagi nelayan kecil bukan untuk nelayan besar padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan seluruh masyarakat (Suhaedi, et al, 2016).

C. Konflik Nelayan

Konflik merupakan salah satu yang bersifat disosiatif yang tidak selalu berarti negatif karena jika konflik yang dihadapi dengan bijaksana dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Dalam masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, konflik adalah salah satu gejala sosial yang akan sering kita temukan ketika kita berbicara tentang komunitas masyarakat di pesisir.

Konflik antar masyarakat nelayan biasanya terkait dengan perselisihan penggunaan alat tangkap ikan. Konflik ini sangat sering terjadi terutama sejak ada isu bahwa alat tangkap ikan berupa arad, cantrang dan trol akan dilarang penggunaannya oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Hal ini dikarenakan ketiga alat tangkap ikan tersebut merusak ekosistem laut. Jika terus digunakan otomatis jumlah ikan akan semakin berkurang karena habitat mereka akan rusak. Meskipun telah dilarang digunakan, namun beberapa oknum masih saja ada yang tetap menggunakan alat tangkap tersebut. Bagi para nelayan tradisional dan nelayan-nelayan yang telah mentaati peraturan, hal ini tentu sangat merugikan. Hal ini seringkali menjadi pemicu konflik antar nelayan di tengah laut (Soni, 2017).

Dalam proses sosial bentuk proses sosial yang bersifat disosiatif (menjauhkan) misalnya persaingan, kontroversi dan konflik. Persaingan sendiri dapat terjadi antar individu maupun kelompok dalam mencapai suatu keuntungan melalui segala aspek kehidupan. Jika persaingan ini terjadi diikuti gejala-gejala ketidak pastian dan keraguan tentang seseorang dan sikap tersembunyi atas gagasan serta budaya yang dimilikinya, hal itu disebut juga kontravensi. Kontravensi yang terjadi dan memunculkan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak karena dikuasai rasa amarah yang berlebihan kita sebut konflik (Majid, 2018).

Menurut Marx, (Kinseng, 2014) kelas sosial merupakan kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan hubungan orang-orang tersebut dengan alat produksi atau berdasarkan kepemilikan alat produksi. Selanjutnya bagi Marx, konflik antar kelas (konflik kelas) atau perjuangan kelas (*class struggle*) ini merupakan konflik sosial yang terpenting dan menemukan sejarah perkembangan suatu masyarakat. Sesuai dengan

pernyataan Marx ” *The history of all hitherto existing society is the history of class struggles*”.

Sementara itu, Weber memberikan pengertian kelas lebih menekankan posisi seseorang atau sekelompok orang di pasar, sejauh posisi ini menentukan “kesempatan hidup” (*life-chances*), sebagai penentu kelas. Seperti di katakan Hamilton dan Hirszowicz, “*Weber diftnes classes in terms of market position in so far as his this determines life-chances.*” Selanjutnya Menurut Dahrendorf, sebenarnya yang menjadi dasar dari kelas sosial itu adalah otoritas. Dia katakan, “*The authority structure of entire societies as well as particular institutional orders within societies (such as industries)...is the structure determinant of class formation and class conflict*” (Kinseng, 2014).

Menurut Marx, (Kinseng, 2014) ada empat faktor yang mendorong tumbuhnya kesadaran kelas dari kelompok subordinat. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Adanya gangguan terhadap kehidupan atau kondisi sosial kelas subordinat akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kelas dominan
2. Praktik-praktik yang di lakukan oleh kelas dominan yang menyebabkan terjadinya alienasi pada kelas subordinat
3. Anggota-anggota kelas subordinat dapat mengomunikasikan kesulitan dan keluhan mereka satu sama lain. Komunikasi ini sendiri di pengaruhi oleh konsentrasi para anggota kelas ini secara ekologis dan ekspansi kesempatan pendidikan bagi mereka
4. Kelas subordinat dapat membangun ideologi yang mempersatukan mereka. Hal ini di fasilitiasi oleh kemampuan mereka merekrut atau menciptakan juru bicara ideologi di satu pihak, dan ketidakmampuan kelas dominan untuk mengatur proses sosialisasi dan jaringan komunikasi di kalangan kelas subordinat tersebut di pihak yang lain

Selanjutnya bagi Marx, (Kinseng, 2014) konflik dan radikalisme sangat berkaitan dengan kesadaran kelas. Marx berpendapat bahwa semakin sadar kelas subordinat akan interes kolektif mereka, maka semakin besar kemungkinannya mereka terlibat dalam konflik terbuka melawan kelas dominan. Dan semakin mantap ideologi pemersatu dan kepemimpinan politik yang terbentuk dalam kelas subordinat, maka akan semakin terpolarisasi dan sulit di rekonsiliasi kelas dominan dan subordinat tersebut. Selanjutnya, semakin terpolarisasi kedua kelas ini, semakin brutal (*violent*) konflik yang terjadi; dan semakin brutal konflik itu, maka akan semakin besar perubahan struktural yang terjadi, serta semakin besar pula redistribusi sumberdaya dalam masyarakat tersebut.

Sejalan dengan kesadaran kelas, White (Kinseng, 2014) menemukan bahwa dukungan dan keterlibatan seseorang dalam kekerasan politik merupakan hasil dari keputusan yang secara sadar di buat oleh orang tersebut, ketika dia merasa bahwa protes damai itu sia-sia belaka. Hubungan antar manusia di laut seiring dicirikan dengan aneka konflik. Kinseng berupaya membedah konflik yang terjadi antara nelayan. Ada

beberapa hal menarik dalam analisis Kinseng terhadap konflik tersebut (Sumber: <http://pkspl.ipb.ac.id/berita-ada-konflikkelas-di-perikanan.html>).

Pertama, Konflik kelas merupakan salah satu ciri konflik nelayan. Perbedaan penguasaan alat tangkap merupakan basis perbedaan kelas nelayan. Dalam kasus ini, konflik kelas nelayan bersifat khas dan berbeda dari konflik kelas industrial yang umumnya hanya melibatkan buruh dan majikan. Dalam pola hubungan kerja di bidang industri perikanan, anak buah kapal (ABK) dan pemilik kapal beraliansi dalam satu kelompok sosial yang berhadapan dengan kelompok sosial yang lain yang juga terdiri dari aliansi ABK dan pemilik. Moda produksi (*mode of production*) nelayan tradisional berkompetisi memperebutkan sumber daya ikan dengan moda produksi nelayan purse seine yang lebih kapitalistik. Akan tetapi, hubungan mereka menjadi hubungan dominasi. Unit modern mengalahkan tradisional. Pada titik ini, hubungan dominasi pemilik kapal terhadap ABK yang bersifat eksploitatif menjadi “terlupakan” karena mereka berada dalam satu aliansi melawan aliansi lain.

Kedua, penegasan Kinseng bahwa konflik yang terjadi adalah konflik kelas semakin menunjukkan bahwa sebenarnya perbedaan etnisitas atau primordial tidak terlalu signifikan sebagai pemicu konflik, melainkan konflik terjadi karena dominasi satu moda produksi terhadap moda produksi lainnya.

Ketiga, Kinseng berhasil mematahkan teori Coser yang mengatakan bahwa ketika konflik menyangkut isu-isu yang realistik yaitu isu-isu yang menyangkut sumber-sumber kehidupan, maka sering terjadi kompromi-kompromi sehingga kebrutalan menjadi rendah. Sebaliknya bila menyentuh isu-isu nonrealistik, seperti keyakinan, ideologi, dan sistem nilai, maka kebrutalan akan memuncak. Hasil penelitian Kinseng, meski terkait isu-isu realistik tetapi bila terkait dengan sumber kehidupan pokok maka kebrutalan akan memuncak.

Keempat, Kinseng memperkenalkan konsep “jarak dominasi” dalam analisis konflik. Jarak dominasi merupakan jarak spasial dominasi satu kelas sosial atas kelas sosial lainnya. Konflik nelayan selalu terjadi pada jarak dominasi tertentu. Analisis spasial ini yang pada akhirnya menjadi dasar bagi penyusunan jalur-jalur penangkapan dan zonasi pesisir.

Menurut Kinseng, (2014) tingkat kebrutalan suatu konflik bukan hanya di tentukan oleh realistik atau tidaknya isu yang menjadi soal dalam suatu konflik, tetapi juga yang menjadi penting adakah apakah isu itu menyangkut masalah “sumber kehidupan” atau tidak. Jika isu yang menjadi sumber konflik itu menyangkut masalah sumber kehidupan atau masalah perut, seperti kata nelayan, maka konflik tersebut cenderung brutal, sekalipun isunya tergolong realistik.

Selanjutnya konflik juga cenderung brutal jika berbagai upaya melalui jalan damai telah dilakukan tetapi hasilnya tidak memuaskan kelas subordinat, apalagi jika dalam upaya damai itu telah dibuat kesepakatan atau perjanjian, yang kemudian dilanggar oleh kelas dominan. Keadaan seperti itu akan membuat kelas subordinat merasa frustrasi; kemarahan mereka semakin meningkat dan terakumulasi, sehingga mendorong mereka untuk mengambil jalan kekerasan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan konflik pada masyarakat nelayan. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2008) dengan judul Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura dalam Perspektif Sosiologis-Hukum. Dalam penelitiannya, Hikmah (2008) menjelaskan tipe dan karakteristik konflik kenelayan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan Selat Madura Propinsi Jawa Timur pra-pasca otonomi daerah, mengidentifikasi pihak-pihak dalam konflik dan menjelaskan peranannya dalam upaya penyelesaian konflik, menelusuri sebabsebab permasalahan konflik serta menjelaskan penanganan dan penyelesaian konflik secara sosial dan hukum.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) tipologi konflik kenelayan yaitu konflik kepemilikan sumberdaya, konflik pengelolaan sumberdaya, konflik cara produksi/ alat tangkap, konflik lingkungan, konflik usaha dan konflik primordial. Konflik cenderung terbuka dan bernuansa kekerasan seperti pada kasus konflik antara nelayan Batah, Kecamatan Kwanyar dengan nelayan-nelayan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pasuruan. Isu utama yang menjadi akar permasalahan konflik adalah berkaitan dengan isu keterbatasan sumberdaya perikanan Selat Madura yang telah overfishing.

Pihak-pihak dalam konflik yaitu komunitas nelayan (kelompok nelayan Batah dan nelayan luar), Diskanla Kabupaten Bangkalan, Muspika Kwanyar, Polsek Kwanyar, Koramil Kwanyar, Aparat Kamla, Tokoh Masyarakat, Tokoh Nelayan dan Penyuluh Lapang. Manajemen konflik dilakukan secara alternatif (*alternative dispute resolution*) dan adjudikasi. Penyelesaian (*resolusi*) alternatif ditujukan untuk menghasilkan suatu kesepakatan atau konsensus, sedangkan adjudikasi secara litigasi efektif untuk meredakan tindakantindakan yang cenderung melanggar hukum, seperti pelanggaran aturan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya serta akibat yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumberdaya.

Upaya pencegahan konflik (*resolving*) yang telah dan masih dilakukan seperti sosialisasi hukum dan perundangan perikanan kepada masyarakat nelayan, patroli aparat Kamla (Keamanan Laut) dalam hal pengawasan dan penegakan hukum perikanan, serta pengaturan penggunaan alat tangkap Minitrawl.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan konflik pada masyarakat nelayan yaitu penelitian yang berjudul Konflik Kelas Nelayan Tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro dan Nelayan Semi Modern (Maulana, 2016).

Penelitian ini membahas tentang proses terjadi konflik antara nelayan tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro dan nelayan jaring kurau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kelas yang terjadi antara nelayan tradisional Kampung Benteng Kecamatan Moro dan nelayan jaring kurau (Kecamatan Durai) disebabkan adanya perbedaan pandangan/kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Seperti klaim terhadap jalur-jalur tangkapan dan cara penangkapan/teknologi tangkapan.

Isu yang terjadi dalam konflik kelas ini adalah faktor ekonomi yakni adanya ketimpangan pendapatan yang berimplikasi pada kesenjangan ekonomi bagi nelayan tradisional Kampung Benteng. Hal ini terjadi karena kecemburuan sosial terhadap nelayan jaring kurau karena memperoleh bagian terbesar dari eksploitasi sumberdaya perikanan. Eksploitasi sumberdaya oleh nelayan jaring kurau telah mengakibatkan kelangkaan sumberdaya perikanan di wilayah Kecamatan Moro, sehingga terganggunya mata pencaharian atau sumber hidup di kalangan nelayan tradisional. Isu ini termasuk dalam *realistic issue*, yaitu isu yang menyangkut sumber hidup atau masalah perut sehingga konflik yang terjadi cukup brutal yaitu dengan adanya pembakaran kapal dan pemukulan nakhoda kapal jaring kurau ketika konflik berlangsung.

Kasus konflik nelayan Bulukumba dengan nelayan Selayar di Sulawesi Selatan Penelitian ini di lakukan oleh Hasti Octavia HP dari Universitas Hassanudin Makassar. Fokus penelitian dalam penelitian ini membahas mengenai tipologi konflik yang terjadi antara nelayan Bulukumba dengan nelayan Selayar dan merumuskan ko-manajemen dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi konflik antara nelayan Bulukumba dan nelayan Selayar digolongkan kedalam konflik orientasi dan agraria.

Konflik tersebut merupakan konflik orientasi karena terdapat perbedaan orientasi antara nelayan Bulukumba yang telah berorientasi terhadap pasar dengan nelayan Selayar yang kebanyakan masih menjunjung nilai-nilai tradisional. Selain itu, konflik ini digolongkan dalam tipe konflik agraria karena adanya perebutan wilayah penangkapan dan pihak yang berkonflik berasal dari wilayah yang berbeda. Strategi ko-manajemen dalam penyelesaian konflik lebih ditekankan pada bentuk yang informatif sehingga nelayan memiliki peran yang cukup penting dalam hal penyelesaian konflik didukung oleh kehadiran pemerintah untuk mengevaluasi bentuk penyelesaian konflik

Kemudian penelitian yang berjudul Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Wijaya, Rohmah & Ismani: 2009) Penelitian ini membahas penyebab

terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu serta cara penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu masih beroperasinya alat tangkap trawl (jaring pukat harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah. Kedua, adanya pelanggaran jalur penangkapan. Ketiga perbedaan teknologi penangkapan. Keempat, kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi pemerintah dan terakhir yaitu belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan.

Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu ini dapat diselesaikan melalui beberapa upaya. Upaya pertama, yaitu kapal-kapal trawl dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nelayan tradisional (0-3 mil laut), jika memang tetap beroperasi, nelayan tradisional menghendaki adanya kontribusi kepada para nelayan tradisional berupa 5 % dari hasil tangkapan nelayan modern. Kedua, yaitu penetapan jalur penangkapan yang jelas bagi nelayan tradisional dan bagi nelayan modern, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran jalur penangkapan. Ketiga, sikap tegas dari Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu terhadap segala macam pelanggaran yang terjadi dan terakhir yaitu upaya menjalin kemitraan usaha antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik menjadi saluran dari akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terusmenerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain (Latief *et al*, 2019).

Konflik dilihat dari segi asal permasalahan dibedakan atas :

- a. Konflik Realistis yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan pare partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contoh, para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya.
- b. Konflik tidak Realistis yaitu konflik yang terjadi bukan dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Contoh, masih digunakannya ilmu gaib dalam kehidupan

masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya seperti balas dendam, sehingga akan muncul seorang kambing hitam dari proses prasangka.

Selain pendapat diatas penyebab timbulnya konflik dikarenakan kurangnya kontrol sosial didalam masyarakat yang tidak diikuti dengan tindakan para penegak hukum sehingga para pelanggar hukum tidak merasa takut atau jera karena ketika melakukan pelanggaran tidak mendapatkan hukuman yang tercantum dalam sebuah peraturan (Dedi Kurniawan dan Abdul Syani, 2013).

D. Konsep Konflik

Menurut Marx (Kinseng, 2014) konflik dan radikalisme adalah pertentangan kepentingan kelas. Hubungan sosial yang bersifat antagonistik menghasilkan konflik sosial. Karena masing-masing kelas sosial itu mempunyai kepentingan yang bertentangan atau antagognistik, maka kelas sosial itu sendiri secara inheren di dalamnya mengandung bibit konflik. Sepanjang kelas sosial itu masih ada, maka dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia lainnya, serta konflik sosial akan selalu ada. Sementara menurut Sanderson (2011) ia memandang konflik dan pertentangan- dan kepentingan dan concern dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan-sebagai determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial.

Dengan kata lain, struktur dasar masyarakat sangat di tentukan oleh upaya- upaya yang di lakukan oleh berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas yang akan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka. Karena sumber- sumber daya ini, dalam kadar tertentu selalu terbatas maka konflik untuk mendapatkannya selalu terjadi. Sementara menurut Kinseng, (2014:12) konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang di tandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik di nyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing masing.

Soekanto (2002) memberikan definisi konflik sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor penyebab utama terjadinya pertentangan adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan budaya yang berpengaruh pada kepribadian setiap individu, perbedaan kepentingan (dalam ekonomi, politik, dan lain sebagainya), dan perubahan sosial terhadap nilai dalam masyarakat. Perbedaan individu dan budaya terjadi karena perbedaan lingkungan yang membentuk kedua belah pihak yang melahirkan prinsip, nilai, kebiasaan atau tata cara yang berbeda. Biasanya konflik akan terjadi jika masing-masing pihak tidak dapat menerima atau menghormati prinsip atau sistem nilai yang dimiliki pihak lain sehingga muncul keinginan untuk mengubah sistem nilai itu.

Menurut Marx, (Kinseng, 2014) kelas sosial merupakan kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan hubungan orang-orang tersebut dengan alat produksi atau berdasarkan kepemilikan alat produksi. Selanjutnya bagi Marx, konflik antar kelas (konflik kelas) atau perjuangan kelas (*class struggle*) ini merupakan konflik sosial yang terpenting dan menemukan sejarah perkembangan suatu masyarakat. Konflik dapat berwujud konflik tertutup (*latent*), mencuat (*emerging*), dan terbuka (*manifest*). Konflik tersembunyi dicirikan dengan adanya tekanan Tekanan yang tidak nampak dan tidak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak konflik. Sering kali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadari adanya konflik bahkan yang paling potensialpun.

Konflik mencuat adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tapi proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum berkembang. Disisi lain konflik terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai untuk benegosiasi, dan mungkin juga mencapai jalan buntu.(Wijardji et all.,2001).

Menurut Wijadjo et all (2001), kebanyakan konflikatas sumberdaya alam mempunyai sebab-sebab ganda. Biasanya kombinasi dari masalah-masalah dari hubungan antar pihak yang bertikai yang mengarah pada konflik terbuka. Lebih lanjut, mengatakan bahawa dari pengalaman empirik diberbagai daerah di Indonesia, sumber konflik atas sumberdaya alam adalah konflik yang ersifat struktural, dengan melibatkan unsur-undur lainnya. Unsur yang di maksud, dapat dianalisis dengan kerangka-kerangka sebagai berikut

- 1) Konflik struktural, terjadi ketika terjadi ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain. Di sisi lain persoalan grafis dan faktor sejarah/waktu seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya meguntungkan pada satu pihak tertentu
- 2) Konflik kepentingan, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentinganterjadi ketika satu pihak atau lebih menyakini bahwa untuk memuaskan nkebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban.
- 3) Konflik nilai, disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu hanya dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti dalam hidupnya. Nilai yang menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Perbedaan nilai tidak harus

menyebabkan konflik. Manusia dapat hidup berdampingan harmonis dengan sedikit perbedaan sistem nilai. Konflik nilai baru muncul ketika orang berusaha untuk melaksanakan suatu sistem nilai kepada orang lain, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dimana didalamnya tidak dimungkinkan adanya percabangan kepercayaan.

- 4) Konflik hubungan antar manusia, terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitive). Masalah-masalah ini sering menghasilkan konflik-konflik yang tidak realistis atau tidak perlu, karena konflik ini bisa terjadi bahkan ketika kondisi obyektif atau terjadinya konflik, seperti terbatasnya sumberdaya atau tujuan-tujuan bersama yang eksklusif, tidak ada. Masalah hubungan antar manusia seperti yang disebut diatas, sering kali memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

Dalam rangka memahami cara mengelola konflik (Fisher et al; 2001) menyebutkan ringkasan teori-teori utama mengenai penyebab terjadi konflik, masing-masing dengan metode dan sasaran yang berbeda. Teori-teori tersebut, antara lain.

- 1) Teori hubungan masyarakat yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah :
 - a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik dan
 - b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
- 2) Teori negosiasi, prinsip yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :
 - a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah tepat
 - b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
- 3) Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar di sebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu dan;
 - b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
- 4) Teori identitas berasumsi bahwa konflik yang disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu pada penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :
- a. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan mereka masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka dan;
 - b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak
- 5) Teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai adalah :
- a. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain;
 - b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain dan;
 - c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya
- 6) Teori transformasi konflik berasumsi bahwa di sebabkan oleh masalah masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :
- a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi
 - b. Mengembangkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik
 - c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengampunan.

E. Faktor-faktor Konflik

Faktor penyebab munculnya konflik disebabkan belum ada solusi mendasar terhadap persoalan yang masih membelenggu nelayan yakni keterbatasan modal sehingga nelayan menjalin ikatan utang dengan juragan/pengepul/supplier. Faktor penyebab konflik juga di sebabkan adanya perbedaan dalam penggunaan teknologi penangkapan. Dalam era ini nelayan modern menanggung/ memperoleh banyak

keuntungan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan laut, sedangkan nelayan tradisional tidak dapat berbuat banyak terhadap situasi tersebut (Subianto, 2014).

Yang menjadi penyebab timbulnya konflik itu dikarenakan kurangnya kontrol sosial yang masyarakat tidak diikuti dengan tindakan para penegak hukum sehingga para pelanggar peraturan ini tidak akan merasakan ketakutan karena telah memahami ketika melakukan pelanggaran tidak akan mendapatkan hukuman yang tercantum dalam peraturan.

Salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat nelayan, terutama antara nelayan tradisional dengan nelayan modern selain disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai alat tangkap ikan, juga disebabkan oleh faktor lain perebutan sumber daya perikanan.

Konflik akses antara nelayan dengan TNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkan konflik akses antara nelayan dengan perusahaan pariwisata disebabkan faktor pengelolaan sumberdaya. Bentuk konflik antara nelayan dengan TNBB berupa perlawanan sehari-hari terutama pada awal pembentukan TNBB di masa Orde Baru. Dalam kondisi tak berdaya dan relasi kuasa yang timpang, perlawanan sehari-hari seperti pencurian, penyebaran isu atau rumor dan ketidakpatuhan pada aturan konservasi merupakan langkah yang ditempuh oleh nelayan. Namun pada masa reformasi khususnya tahun 2000-an, perlawanan secara tersembunyi relatif jarang ditemui karena dapat dilakukan melalui protes secara langsung atau terbuka dengan Balai TNBB (Kinsen, Dkk 2016).

Secara teoritis penyebab konflik tidak timbul dari faktor tunggal, melainkan timbul dari beberapa faktor, seperti faktor struktural yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, peraturan dalam perundang-undangan dan kebijakan lainnya, kemudian adanya faktor kepentingan persoalan geografis dan faktor sejarah, faktor nilai, faktor sosialbudaya, faktor data

Sumber penyebab konflik antar nelayan di kepulauan selayar di dominasi dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan dengan persentase 31% yang disusul dengan penyebab pelanggaran jalur penangkapan dengan persentase 23%. Yang diperoleh berdasarkan persepsi informan di daerah penelitian (Arief, A.A et al, 2020).

F. Analisis Konflik

Menurut Fisher et al (2001) analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang, selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan sesuai yang dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya untuk memahami konflik, yaitu:

- 1) Kronologi konflik (urutan kejadian) merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menunjukkan sejarah konflik berdasarkan waktu kejadiannya (hari/ bulan/ tahun sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat ini menjadi starting point dalam memahami konflik karena mampu mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak untuk digunakan bagi kepentingan mereka sendiri maupun untuk dipergunakan bersama dengan pihak lain.
- 2) Penahapan konflik merupakan alat bantu yang ditujukan untuk menganalisis berbagai dinamika yang terjadi pada masing-masing tahap konflik. Analisis tersebut meliputi lima tahap yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.
- 3) Pemetaan konflik yang merupakan visualisasi terhadap hubungan-hubungan Dinamis antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Selain ditujukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing pihak, alat bantu ini berguna untuk menganalisis tingkat dan jenis hubungan di antara pihak-pihak tersebut.

G. Dampak Konflik

Berdasarkan hasil Penelitian (Nulhaqim dan Maulana,2017) terdapat enam hal yang menjadi dominan dalam dampak konflik pada masyarakat nelayan yaitu menimbulkan kerusakan lingkungan seperti halnya merusak biota laut dan sumber daya air bersih di sekitar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) maupun daerah masyarakat nelayan pada umumnya, kerusakan bangunan seperti halnya kaca-kaca rumah warga yang rusak karena dilempari batu dan alat tajam lainnya ketika terjadi perkelahian antar pemuda, perpecahan antar anggota masyarakat, berkurangnya kepercayaan dari anggota masyarakat terhadap pemerintah setempat dan konflik yang terjadi menimbulkan adanya perubahan nilai budaya.

Dampak konflik yang paling dominan yaitu adanya korban jiwa, baiknya luka ringan atau berat bahkan kehilangan nyawa. dampak gangguan atau hambatan dalam aktifitas mencari ikan biasanya dipicu oleh permasalahan alat tangkap ikan. hal ini disebabkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dinilai akan merusak habitat laut dan secara otomatis akan merugikan nelayan cangkol yang sudah menerapkan alat tangkapan ramah lingkungan. Dampak hambatan dalam modal kerja ketika terjadi konflik antara masyarakat nelayan dan pemerintah.

Pemerintah saat ini dinilai kurang tanggap dalam menangani masalah kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan oleh masyarakat nelayan, bahwa beberapa kali masyarakat nelayan mengajukan proposal terkait permohonan bantuan. Namun proposal tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah /Dinas Kelautan. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menyampaikan kebutuhan yang mereka perlukan dari pemerintah.dalam sebuah konflik akan menimbulkan berbagai macam dampak. Dampak konflik antar warga yang paling berbahaya adalah dampak terhadap psikologis, dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan dampak terhadap budaya. Dari berbagai macam dampak tersebut tidak selamanya bernilai negatif, namun juga ada dampak yang bernilai positif, dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut (Syani & Kurniawan, 2012) :

a. Psikologis

Konflik dapat menimbulkan rasa trauma, selalu merasa tidak aman, bahkan berkurang/hilangnya rasa kepercayaan diri dari individu dalam masyarakat tersebut. Hal ini karena pada dasarnya setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang lainnya, dan kebutuhan itu harus terpenuhi sesuai dengan kadarnya masing-masing.Maslow (dalam Wijono, 2012) mengungkapkan tingkat kebutuhan individu yang kaitanya dengan kebutuhan hidup untuk mencapai sebuah ketenangan yang harus terpenuhi pada setiap individunya adalah: Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*),kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan sosial dan kasih sayang (*social and belongingness needs*),kebutuhan harga diri (*self esteem needs*), kebutuhan alkulturasi diri (*self actualization needs*).

b. Ekonomi

Masalah perekonomian yang timbul dampaknya adalah: Pertama, kemiskinan, adalah dimana korban dari sebuah konflik tersebut menderita kerugian rusaknya fasilitas, penjarahan, bahkan ketika ada anggota keluarga yang terluka maka pengobatan secara pribadi. Kedua, turunya aktifitas perekonomian, dalam hal jual beli akan menurun, dimana adanya rasa trauma akan kepemilikan barang-barang yang telah dijarah, ataupun juga karena keadaan keuangan yang tidak memungkinkan.

Ketiga, melonjaknya kebutuhan pokok, keadaan yang belum stabil dimanfaatkan para pedagang untuk menaikkan harga kebutuhan pokok.

Dampak pertama dari teori diatas adalah kemiskinan. Kadar seseorang bisa dikatakan miskin adalah relatif dan tidak bisa diukur dengan kasat mata. Dari dampak konflik yang terlihat dapat diketahui adanya perubahan-perubahan yang mencolok dari segi perekonomian ini. Masyarakat yang dahulu memiliki rumah bagus, pakaian yang banyak, kendaraan, pliharaan ternak, perabotan rumah tangga, alat elektronik dan asset-set berharga lainnya kini setelah konflik itu terjadi semua harta benda itu telah musnah. Yang mereka miliki hanya pakaian yang menempel di badan dan tanah tempat berdirinya bangunan dan lading pertanian yang surat-suratnya pun sudah lenyap hangus terbakar.

Dampak ini merupakan dampak yang akan sangat mudah kita ketahui secara kasat mata, karena hingga saat ini dampak rusaknya pemukiman-pemukiman ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Kedua, turunnya aktifitas perekonomian, dalam hal jual beli atau pertanian akan menurun. Adanya rasa trauma akan kepemilikan lahan-lahan perekonomian tersebut.

c. Sosial

Menurut Wijono (2012:235), pola kehidupan sosial itulah yang dapat dengan mudah kita ketahui akan keberadaan konflik itu. Karena hal ini bisa kita lihat dampaknya dalam kehidupan, baik itu berupa dampak positif atau dampak negatif dari konflik bagi kehidupan sosial, adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif Konflik

- a. Membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka,
- b. Memotivasi orang lain untuk memahami setiap posisi orang lain,
- c. Mendorong ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan,
- d. Dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan cara mendorong orang untuk membuat asumsi melakukan perbuatan.

2. Dampak Negatif Konflik

- a. Dapat menimbulkan emosi dan stress negatif,
- b. Berkurangnya komunikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk kordinasi,
- c. Munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif,
- d. Dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif,
- e. Memberikan tekanan loyalitas terhadap sebuah kelompok

H. Resolusi Konflik

Resolusi konflik diperlukan karena solusi-solusi konflik yang telah dilakukan sebelumnya belum terlalu efektif dalam meredam konflik nelayan yang terjadi selama ini. Diperoleh keterangan bahwa solusi konflik nelayan pada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya hanya berbentuk perjanjian penyelesaian konflik dan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sudah saatnya dalam penyelesaian konflik nelayan yang terjadi harus dalam kerangka formula yang sistematis dan regulatif. Dengan demikian diperlukan semacam analisis yang mendalam agar isu-isu konflik tidak menjadi perulangan yang berkali-kali (Arief,A.A et al,2020).

Teori resolusi konflik merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi konflik, melalui pihak yang membantu untuk mengeksplorasi, menganalisis serta mereka ulang posisi dan kepentingan mereka. Resolusi konflik muncul ketika terjadi pada proses menuju perdamaian. Resolusi konflik merupakan istilah yang komprehensif yang menerapkan sumber konflik dan akar konflik akan diperhatikan dan diselesaikan untuk menemukan resolusi konflik. Proses resolusi konflik juga harus memperhatikan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut atau kearifan lokal, maupun pilihan yang diberikan stakeholders yang terlibat dalam proses resolusi kepada pihak yang berkonflik (Ngarasati, *et al*, 2020).

I. Kerangka Pikir

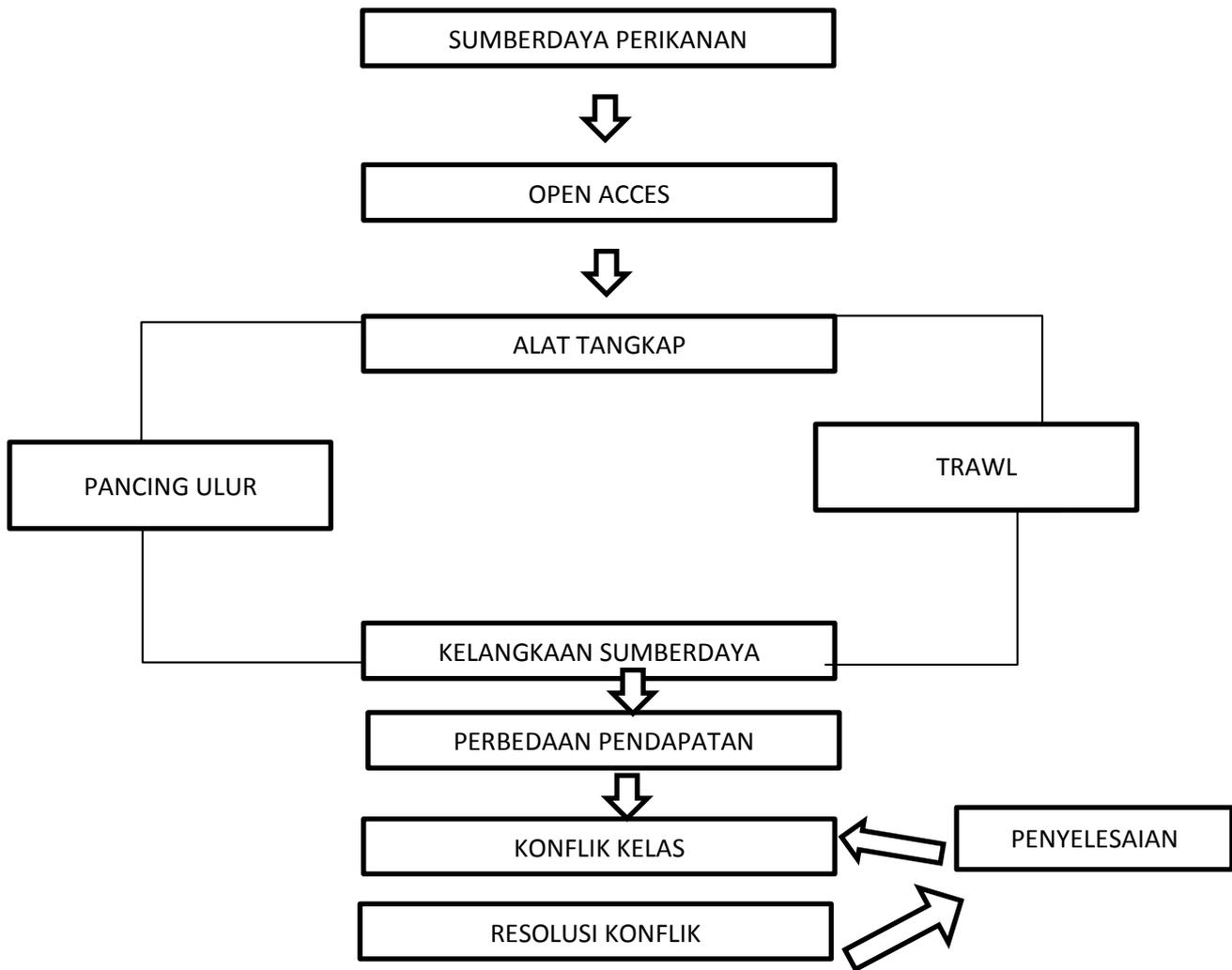
Dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering di temukan di berbagai wilayah perairan. Menurut Satria (2000) gejala konflik antar nelayan sering terjadi di sebabkan perebutan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Perebutan ini muncul karena karakteristik sumberdaya perikanan yang bersifat open access, seolah-olah sumberdaya dapat dikuasai sembarang orang, di sembarang waktu dan dengan sembarang alat tangkap. Selain itu, permasalahan yang dihadapi nelayan bukan satu-satunya dilihat dari tingginya tingkat ketergantungan akan sumberdaya perikanan, melainkan secara nyata nelayan juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi praktik-praktik yang berlaku diareal fishing ground mereka seperti penggunaan alat tangkap yang lebih canggih/modern.

Konflik mengenai alat tangkap yang dihadapi oleh nelayan tradisional dan nelayan modern sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat di mana konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Bagi nelayan tradisional, menjaga ekosistem laut dengan cara mengembangkan budaya kerarifan lokal sangat penting demi keberlangsungan hidup untuk jangka waktu yang lama.

Menurut Kusnadi (2003) bahwa masuknya modal dan teknologi yang lebih canggih telah mempercepat proses penipisan dan kelangkaan sumberdaya perikanan yang ada. Di samping itu, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial juga meningkat di bandingkan dengan masa sebelum dioperasikannya alat tangkap yang lebih modern. Sejalan dengan itu, perbedaan kapasitas teknologi serta modal, dan akses antarpengguna sumber daya perikanan berpotensi menimbulkan konflik pengelola sumber daya.

Dalam kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional Pulau Sanane bentuk kesulitan nelayan dapat di lihat dari kapasitas Alat tangkap yang masih sederhana, biaya operasional melaut , penghasilan yang tidak dapat di prediksi secara pasti serta terganggunya aktifitas penangkapan nelayan dikarenakan maraknya operasi penangkapan berupa alat tangkap jaring trawl telah berhujung pada konflik kelas nelayan. Konflik kelas yang terjadi pada kehidupan nelayan tradisional Pulau Sanane dan nelayan Trawl, konflik yang terjadi di sebabkan adanya rasa ketidakpuasan nelayan tradisional terhadap nelayan modern (trawl) yang memasuki areal tangkapan rutinitas mereka serta menjadi alasan jika berkurangnya Tangkapan Mereka di akibatkan pengoperasian alat Tangkap yang Tidak ramah lingkungan (trawl).

Konflik yang terjadi tidak selamanya akan menimbulkan efek negative apabila ada upaya untuk mengelolanya. Penyelesaian konflik melibatkan pihakpihak yang berkonflik (individu/kelompok/komunitas). Pengelolaan konflik ditujukan bukan hanya untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga untuk mendapatkan resolusi. Bagaimanapun juga, penyelesaian konflik dan resolusinya dilakukan secara seimbang agar pihak yang berselisih berdamai dan meredam tindakan- tindakan anarkis yang berujung pada peristiwa bentrokan. Selain itu, adanya resolusi berpeluang untuk mendapatkan acuan dalam menetapkan kebijakan dan peraturan-peraturan terhadap usaha pemanfaatan sumberdaya, dan bagi nelayan dapat menjamin hak-haknya di dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.



(Gambar 1. Skema kerangka pikir)